

Perubahan Masyarakat: Beberapa Masalah Pergeseran Peranan Para Pemuka Masyarakat

SOEKANTO*

Setiap masyarakat, betapapun sistem sosial dan kebudayaannya masih sangat sederhana, senantiasa mengalami perubahan.¹Perubahan tersebut terjadi karena berbagai faktor, yaitu karena bertambah besarnya jumlah anggota masyarakat, semakin berkurangnya daya dukung lingkungan hidup, penemuan-penemuan baru, pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing, pemberontakan, perang ataupun revolusi. Ini semua dapat menimbulkan perubahan dalam sistem sosial, baik mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, interaksi sosial, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, maupun mengenai lapisan-lapisan sosial, kekuasaan dan wewenangnya.²

Mengenai arah perubahan masyarakat, seorang sosiolog yang juga dikenal sebagai bapak sosiologi, Auguste Comte, mengatakan bahwa perkembangan masyarakat melewati tiga tahap sesuai dengan tahap-tahap perkembangan pikiran manusia, yaitu: tahap teologi, tahap metafisika, dan kemudian tahap positif.³ Secara ekonomi, W.W. Rostow, mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat melalui lima tahap pertumbuhan, yaitu: tahap masyarakat tradisional, prasyarat menuju lepas landas, lepas landas, gerak menuju kematangan, dan kemudian tahap konsumsi massa tinggi.⁴ Sementara itu, Alvin Toffler, berpendapat bahwa hingga kini dunia telah dilanda tiga gelombang peradaban. Gelombang peradaban pertama ditandai dengan ketergantungan

*Staf CSIS.

¹Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (ed.), *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), hal. 487.

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 303.

³*Ibid.*, hal. 399.

⁴W.W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (London: Cambridge University Press, 1971).

manusia pada alam, gelombang peradaban kedua mengutamakan kekuatan fisik manusia, dan gelombang peradaban ketiga yang melanda dunia sejak tahun 1970-an lebih mengutamakan kekuatan otak manusia.⁵

Beberapa pendapat tersebut menunjukkan adanya persamaan, yaitu masyarakat cenderung berkembang ke arah yang lebih maju. Hal itu terjadi terutama karena semakin tumbuh dan berkembangnya pengetahuan ilmiah, yang kemudian secara bertahap mampu melahirkan penemuan-penemuan baru, baik mengenai unsur-unsur kebudayaan material maupun non-material.⁶ Ini semua lambat laun mempengaruhi dan kemudian menimbulkan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat, sehingga ada kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berkurang perannya, bahkan kemudian tidak berperanan sama sekali, tetapi juga muncul dan berperannya kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan baru. Pergeseran peranan tersebut seringkali juga diikuti pergeseran peranan para pemimpin ataupun pemuka masyarakat.

Perubahan-perubahan sosial semacam itu juga terjadi dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, ada kesan bahwa perubahan-perubahan tersebut berbeda dengan yang terjadi di negara-negara maju. Di negara-negara maju, perubahan sosial dan kebudayaannya berkembang secara bertahap, mulai dari tahap pertama hingga tumbuhnya masyarakat yang modern sekarang ini. Akan tetapi, faktor-faktor kemajuan atau modernitas dari setiap tahap perkembangan di negara-negara maju banyak yang melanda masyarakat Indonesia secara serempak.

Apalagi setelah Proklamasi Kemerdekaan, dan lebih-lebih setelah dilaksanakannya pembangunan nasional sejak tahun 1969, banyak unsur-unsur kebudayaan asing yang sengaja dimasukkan serta semakin menderasnya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat menjadi semakin kompleks. Akibat-akibatnya, antara lain adalah timbulnya perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, sehingga ada pemimpin atau pemuka masyarakat yang berkurang, bahkan kehilangan perannya dalam masyarakat. Permasalahannya adalah bahwa pergeseran peranan para pemuka masyarakat tersebut seringkali ditanggapi secara tidak wajar, sehingga kemungkinan timbulnya konflik sangat besar, yang justru akan menghambat proses perkembangan masyarakat dan negara bangsa.

⁵Alvin Toffler, *The Third Wave* (New York: William Morrow & Company, 1980).

⁶D.P. Johnson, "Perubahan Sosial dalam Perspektif Teori-teori Sosial," di dalam Aminuddin Siregar (ed.), *Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), hal. 2.

PERGESERAN PERANAN PEMUKA MASYARAKAT

Masyarakat bangsa Indonesia merupakan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Tumbuhnya masyarakat bangsa Indonesia dengan wujudnya yang sekarang ini melalui proses perubahan dan perkembangan yang amat panjang. Semula, secara horisontal struktur sosialnya terdiri dari berbagai kesatuan sosial yang berbeda satu dengan lainnya, baik karena perbedaan suku, adat, daerah, ras, maupun perbedaan agama dan kepercayaan. Di samping itu, secara vertikal struktur sosialnya pun terdiri dari banyak lapisan sosial. Lagi pula, setiap kesatuan sosial masih terbagi ke dalam kelompok-kelompok sosial dan setiap kelompok sosial itu pun mempunyai kebudayaan khusus sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya.⁷

Dengan adanya pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun masyarakat itu pun mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang menonjol, antara lain adalah akibat pengaruh kebudayaan Hindu, Budha, Islam, dan kemudian Barat. Lebih-lebih setelah tahun 1800, perkembangan dalam lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan semakin meningkat. Sejak itu, bermunculan golongan-golongan sosial baru, yaitu golongan pamong praja bangsa Belanda, golongan pegawai orang-orang bumiputera, golongan pengusaha partikelir bangsa Eropa, golongan akademisi orang-orang bumiputera, golongan menengah baru orang-orang bumiputera yang memiliki usaha di bidang perniagaan dan kerajinan, dan golongan pengembara.⁸ Munculnya golongan-golongan sosial baru itu lambat-laun memudarkan peranan golongan bangsawan yang sangat feodalistis.

Perubahan masyarakat selanjutnya yang menonjol adalah setelah masuknya pengaruh nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Barat dalam awal abad ke-20. Paham itu terutama mempengaruhi para akademisi, baik yang belajar di luar negeri maupun di dalam negeri. Namun demikian, seperti akibat pengaruh unsur-unsur kebudayaan Hindu, Budha dan Islam, pengaruh unsur-unsur kebudayaan Barat, khususnya nasionalismenya, juga tidak menimbulkan Baratisasi dan matinya kebudayaan Nusantara, melainkan menumbuhkan akulturasi, yaitu antara lain memacu penemuan konsep kebangsaan sendiri yang berbeda dengan konsep nasionalisme Barat.⁹

⁷Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal. 29.

⁸D. H. Burger, *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Bhratara, 1977), hal. 82.

⁹Soepardjo Roestam, "Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa Dewasa Ini Demi Penguatan Eksistensi Negara Bangsa," *Analisa*, XIII, No. 11 (November 1984), hal. 835.

Di samping itu, juga banyak di antara para akademisi yang mempelajari, dan kemudian terpengaruh oleh berbagai macam ideologi, seperti kapitalisme, individualisme, sosialisme, komunisme, dan reformisme Islam. Itu semua lambat laun juga menimbulkan perubahan-perubahan sosial, khususnya mengenai lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatannya. Bermula muncul gerakan-gerakan sosial, yang ditandai dengan munculnya perkumpulan-perkumpulan sosial, pendidikan, kebudayaan, kedaerahan dan keagamaan. Kemudian muncul gerakan-gerakan sosial yang agak luas, yaitu ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang anggota-anggotanya tidak hanya orang-orang sesuku, sedaerah dan seagama. Dan, selanjutnya muncul gerakan-gerakan politik, yaitu antara lain ditandai dengan munculnya partai-partai politik yang mempunyai ideologi sendiri-sendiri.¹⁰

Dalam era kebangkitan nasional, terlihat bahwa peranan kaum bangsawan yang dalam periode sebelumnya mulai memudar, semakin tergeser oleh peranan kaum akademisi bumiputera yang mulai menonjol. Di antara para akademisi, banyak yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan Hindia Belanda, tetapi kemudian banyak yang menjadi pemimpin dan anggota gerakan kebangsaan. Perkembangan baru itu menunjukkan bahwa masyarakat semakin memberi penghargaan yang tinggi kepada mereka, dan adanya kenyataan bahwa kaum akademisi memang dibutuhkan untuk menangani tugas-tugas pokok yang dihadapi oleh gerakan kebangsaan.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa peranan kaum akademisi yang semakin menonjol tersebut ternyata juga mengandung benih-benih pergeseran. Karena, di antara kaum akademisi banyak yang kadar kecendekiawannya¹¹ merosot, serta banyak yang fanatik dan memutlakkan kebenaran ideologi yang dianutnya. Hal itu terlihat dengan adanya pertentangan antara golongan Islam dan komunis dalam tahun 1920-an, antara golongan Islam dan kebangsaan yang sekuler, serta antara golongan kebangsaan yang pro dan yang anti-Jepang dalam tahun 1945-an. Namun demikian, keterikatan gerakan-gerakan kebangsaan akan tujuan bersama untuk menegara yang merdeka dalam akhir era kebangkitan nasional sangat kuat dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan suku, kedaerahan, agama, golongan dan ideologinya, sehingga mereka mampu melahirkan negara merdeka.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 menjadi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadilah perubahan yang sangat cepat atau revolusi,

¹⁰Herbert Feith, "Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965," di dalam Aminuddin Siregar (ed.), *Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), hal. 140.

¹¹Dick Hartoko (ed.), *Golongan Cendekiawan* (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hal. viii.

yaitu para warga masyarakat Nusantara memasuki kehidupan yang baru, yakni menjadi anggota bangsa dan sekaligus juga menjadi warganegara Indonesia. Sejak itu pula terjadilah perubahan-perubahan yang sangat cepat, baik dalam tatanan kenegaraan maupun dalam tatanan kemasyarakatannya. Dan, perubahan dan perkembangan tersebut juga diikuti dengan pergeseran-pergeseran peranan para pemimpin dan para pemuka masyarakatnya.

Dalam perubahan lembaga-lembaga kenegaraan, terlihat bahwa lembaga-lembaga negara bentukan Jepang dan Belanda secara cepat diganti dengan lembaga-lembaga negara baru berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Kalaupun ada lembaga-lembaga kenegaraan bentukan penjajah yang masih dipertahankan, fungsi dan orientasinya disesuaikan dengan semangat revolusi dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, proses pembentukan dan fungsionalisasi lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni sulit dilaksanakan. Ini terjadi terutama karena pertentangan antargolongan yang mempunyai ideologi sendiri-sendiri masih tetap berlangsung. Apalagi setelah dikeluarkannya pengumuman pemerintah tentang kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik, dan kemudian dengan diberlakukannya sistem kabinet parlementer dalam bulan Nopember 1945-1949, pertentangan ideologi tersebut semakin meningkat.

Lagi pula, dalam tahun 1945-1949, hampir seluruh kekuatan negara dicurahkan sepenuhnya untuk menghadapi Belanda yang berusaha menjajah Indonesia kembali. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi negara, Pancasila, dan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, belum sempat dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan belum sempat disosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat luas. Dalam keadaan yang demikian itu, maka banyak warga masyarakat yang tersosialisasi ke dalam kesatuan-kesatuan primordial yang dianggap lebih mapan. Oleh karena itu, maka banyak orang yang cenderung menafsirkan berbagai masalah nasional berdasarkan sistem nilai yang dianutnya. Dan, belum lagi lembaga-lembaga kenegaraan berdiri secara kukuh, terjadilah pemberontakan di Madiun dalam tahun 1948, dan kemudian terjadi pergantian konstitusi, yaitu diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam tahun 1949.

Dalam menegara, fungsi masyarakat dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan, perserikatan, perhimpunan, ataupun kelompok-kelompok sosial lainnya. Perubahan dan perkembangan selama tahun 1945-1949, menunjukkan bahwa sebagian besar jabatan-jabatan penting, baik dalam lembaga-lembaga kenegaraan maupun kemasyarakatan, dipegang oleh kaum akademisi. Namun demikian, lambat-laun di antara mereka banyak yang meninggalkan orientasi kecendekiawanannya. Bahkan, yang masuk menjadi anggota-anggota partai politik dan yang fanatik terhadap ideologi golongannya bertambah banyak, sehingga banyak yang terperosok ke dalam pertentangan golongan

dan ideologi. Walaupun dalam periode ini hubungan antara dunia pemikiran politik dan kekuasaan politik sangat erat,¹² tetapi karena perbedaan pemikiran-politik dan golongan-golongan politik selalu dipertajam, maka para pemimpin dan pemuka masyarakat yang sebagian besar terdiri dari kaum akademisi tidak mampu melahirkan program-program yang siap dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Diberlakukannya Undang-undang Dasar Sementara 1950, yang menganut sistem demokrasi liberal, seakan-akan hanyalah memperkuat perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam periode sebelumnya. Kalau dalam periode 1945–1949 pertentangan golongan dan ideologi masih terbatas di kota-kota besar, terutama di Jakarta, maka dalam periode 1950–1959 pertentangan tersebut semakin luas. Ini terjadi, karena menjelang pemilihan umum tahun 1955, setiap partai politik berlomba-lomba membentuk cabang-cabang dan ranting-rantingnya sampai di daerah-daerah pedesaan. Karena fanatisme golongan dan ideologi juga ditanamkan sampai ke daerah-daerah pedesaan, maka pertentangan tersebut pun menjadi semakin luas, bahkan pertentangan itu tidak lagi terbatas pertentangan politik dan ideologi saja, melainkan juga menimbulkan pertikaian sosial yang sangat sengit.

Hasil pemilihan umum tahun 1955, menunjukkan bahwa empat partai politik yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI, muncul sebagai partai-partai politik yang besar. Namun demikian, hasil pemilihan umum itu ternyata tidak meredakan pertentangan politik, ideologi dan sosial. Ini terjadi, antara lain karena para akademisi yang menjadi tokoh-tokoh politik tidak lagi memperlihatkan kecendekiawanannya, melainkan lebih terlihat sebagai kaum politikus yang mengutamakan golongan dan pengikutnya. Di samping itu, dalam periode ini perjuangan partai-partai politik dalam memenangkan ideologi partainya menjadi ideologi negara semakin menjadi-jadi, sehingga pertentangan politik dan ideologi pun semakin panas. Bahkan, pertentangan tersebut nyaris meruntuhkan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Memuncak dan meluasnya pertentangan politik dan ideologi tersebut turut membuka peluang kepada kaum militer untuk ikut berperan dalam kehidupan politik. Apalagi setelah pemberontakan PRRI dan Permesta dapat ditumpas secara militer, peranan militer menjadi semakin menonjol. Dan, mungkin sekali karena dukungan militer, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden berani memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam awal periode 1960–1965, Masyumi, PSI dan Murba dibubarkan, dan partai-partai politik lainnya seakan-akan lumpuh. Namun demikian, PKI yang sangat lihai mengambil hati Presiden lambat-laun memperoleh peluang untuk memainkan pelbagai peranan penting. Semakin besarnya peranan dan luasnya penyusupan PKI dalam pelbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat,

¹²Herbert Feith, *op. cit.*, hal. 144.

membangkitkan keberanian partai-partai politik lainnya dan ABRI untuk tampil kembali dalam kehidupan politik. Persaingan PKI dengan partai-partai politik lainnya dan ABRI, khususnya Angkatan Darat, semakin tajam, sehingga seringkali menimbulkan pertentangan politik. Dan, mungkin sekali setelah merasa dirinya paling kuat, PKI berani melakukan perebutan kekuasaan negara, yaitu dengan terjadinya peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965, yang hampir menghancurkan Negara Proklamasi.

Hingga tahun 1965, terlihat bahwa pergeseran-pergeseran peranan para pemimpin dan pemuka masyarakat dapat dikatakan belum mampu menciptakan kemajuan yang berarti bagi masyarakat dan negara bangsa. Bahkan, pergeseran peranan para pemimpin dan pemuka masyarakat yang disertai pertentangan golongan dan paham golongannya, nyaris menghancurkan negara bangsa. Setelah berulang kali terjadi peristiwa-peristiwa yang hampir meruntuhkan Negara Proklamasi, timbul kesadaran bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pertentangan ideologi, politik dan sosial adalah karena Pancasila tidak lagi dijadikan dasar dalam kehidupan negara dan masyarakat. Kesadaran ini semakin kuat, sehingga dalam tahun 1966 melahirkan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Sejak awal kebangkitannya, Orde Baru berusaha memperbaharui kehidupan politik, baik mengenai lembaga-lembaga kenegaraan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 baru lengkap dan bersifat definitif setelah Pemilihan Umum 1971, yang kemudian diperkuat lagi dengan Pemilihan Umum 1977 dan 1982. Dari perkembangan lembaga-lembaga kenegaraan tersebut, terlihat bahwa perkembangan lembaga eksekutif yang ditunjang oleh ABRI lebih menonjol daripada lembaga-lembaga negara lainnya. Sejak Orde Baru itu pula terlihat bahwa evolusi dari atas yang melanda lembaga-lembaga kenegaraan semakin menonjol.¹³

Setelah pembangunan nasional dalam tahun 1969, peranan lembaga eksekutif beserta segenap aparturnya bertambah luas. Kalau sebelumnya fungsi pemerintah masih terbatas pada tugas-tugas umum pemerintahan, tetapi setelah dilaksanakannya pembangunan nasional fungsi pemerintah juga meliputi tugas-tugas pembangunan. Adanya tugas baru tersebut ditanggapi oleh pemerintah dengan memperluas dan memperkuat aparat pemerintah beserta jaringannya, dan dengan membentuk lembaga-lembaga baru yang secara khusus menangani tugas-tugas pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat desa.

Evolusi dari atas tersebut juga melanda lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ini terlihat dari adanya campur tangan pemerintah dalam pembaharuan lembaga-lembaga kemasyarakatan, yaitu dilakukannya penyederhanaan jumlah dan

¹³R. William Liddle, "Evolusi dari Atas: Pemimpin Nasional dan Pembangunan Daerah di Indonesia," di dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 126.

struktur partai-partai politik. Dari proses penyederhanaan tersebut, kini terlihat adanya dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan satu golongan karya, yaitu Golongan Karya. Dan, struktur kepengurusannya juga disederhanakan, yaitu hanya sampai Daerah Tingkat II atau Kabupaten.

Di samping itu, juga diadakan penyederhanaan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, ternyata tidak hanya memberi peluang berdirinya partai-partai politik, melainkan juga tumbuhnya organisasi-organisasi massa. Sejak itu bermunculan organisasi-organisasi massa baru, baik yang berafiliasi maupun yang tidak berafiliasi kepada partai-partai politik. Kemudian, juga bermunculan organisasi-organisasi fungsional, tetapi banyak diantaranya yang berafiliasi kepada partai-partai politik. Oleh karena itu, dalam tahun 1945-1965 pola kehidupan kelembagaan dalam masyarakat sangat kacau. Setelah bangkitnya Orde Baru, pola kehidupan kelembagaan tersebut hendak ditata kembali, yaitu diorientasikan pada program sesuai dengan profesi dan fungsinya masing-masing. Dengan semakin berkembangnya diferensiasi dan spesialisasi, maka hal itu membuka peluang bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan profesi dan fungsi untuk tampil dalam kehidupan negara dan masyarakat, seperti IDI, PII, PWI, dan lain-lainnya; serta, munculnya organisasi-organisasi profesi dan fungsional baru, seperti HKTI, HNSI, SPSI, KNPI, dan sebagainya

Dari perkembangan kehidupan kelembagaan sejak bangkitnya Orde Baru, ada kesan bahwa peranan kaum militer atau ABRI dalam menegara lebih dominan daripada golongan-golongan lainnya. Kemudian, setelah gencarnya pembangunan nasional sejak tahun 1969, kaum birokrat yang dalam periode-periode sebelumnya tidak menonjol, bangkit kembali dan memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Ini terjadi, terutama karena dengan dicanangkannya pembangunan nasional, fungsi birokrasi tidak hanya menangani tugas-tugas umum pemerintahan saja, melainkan juga mendapat tambahan tugas baru, yaitu tugas-tugas pembangunan. Tugas-tugas pembangunan itu meliputi juga tugas pengarahan, pembimbingan dan penggerakan masyarakat, sehingga nantinya usaha-usaha pembangunan dapat ditangani sendiri oleh masyarakat secara baik.¹⁴ Namun demikian, dalam perkembangannya peranan birokrasi, beserta kaum birokratnya, semakin dominan dalam pembangunan, bahkan hampir seluruh usaha pembangunan ditanganinya sendiri. Bila kecenderungan dominasi birokrasi tersebut tidak diimbangi dengan mendorong organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk ikut berperanan dalam pembangunan, maka tidak mustahil Indonesia akan menjadi negara birokratik.

Kelompok-kelompok sosial lainnya yang mempunyai peranan penung dalam era Orde Baru adalah kaum akademisi. Namun demikian, karena kaum

¹⁴Soewarno Hadiatmodjo, "Peranan Administrasi Negara dalam Mensukseskan Repelita III," *Administrasi Negara*, XIX, No. 24, hal. 7.

akademisi terdiri dari banyak lapisan,¹⁵ yang juga berbeda-beda orientasinya, maka kekuatan dan peranannya pun tidak terpadu. Di antara kaum akademisi, yang peranannya sangat menonjol adalah mereka yang menangani manajemen pembangunan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum teknokrat. Selanjutnya, adalah mereka yang menangani pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan teknologi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum ilmuwan. Dan, kemudian mereka yang bekerja di kantor-kantor pemerintah maupun swasta, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum pekerja kantor atau *the white-collar workers*, seperti para hakim, jaksa, dokter, insinyur, ahli hukum, dan kaum profesional lainnya.

Di samping berlangsungnya evolusi dari atas, dalam era Orde Baru juga terdapat evolusi dari bawah atau dari dalam masyarakat itu sendiri. Apalagi setelah dilancarkannya pembangunan nasional dalam tahun 1969 dan semakin banyaknya proyek-proyek yang dibangun. Sejak itu terlihat bahwa pelbagai bidang kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang relatif pesat. Terutama dari perkembangan bidang ekonomi, terlihat bahwa laju perkembangan sektor-sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa kemasyarakatan, lebih pesat daripada sektor pertanian. Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terjadi gerak atau mobilitas sosial. Dan, dengan semakin meningkatnya sektor-sektor industri dan perdagangan, maka berarti pula bahwa penghargaan masyarakat terhadap pekerjaan dagang yang semula sangat rendah, cenderung semakin meningkat. Ini juga merupakan indikator bahwa mental pegawai dan mental priyayi yang semula dominan dalam masyarakat, cenderung semakin pudar. Dengan demikian, lambat-laun masyarakat pun tidak hanya menghargai pekerjaan halus, melainkan juga pekerjaan kasar. Bahkan, secara berangsur-angsur etos kerja dan semangat profesionalismenya pun akan semakin meningkat.

Di samping itu, perkembangan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat juga menimbulkan berbagai masalah yang kompleks, yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya secara umum, melainkan menuntut penyelesaian secara spesifik. Ini terjadi, terutama karena dalam perkembangan itu juga berlangsung diferensiasi yang semakin rumit, yang juga disertai berlangsungnya spesialisasi dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Berkembang pesatnya bidang-bidang kehidupan masyarakat itu, juga mendapat tanggapan masyarakat. Ini terlihat dengan semakin besarnya hasrat para warga masyarakat akan pendidikan, bahkan hal itu kemudian menarik perhatian generasi muda dari masyarakat yang pendidikannya murni agama. Kalau dahulu perhatian dalam dunia pendidikan dipusatkan demi tercapainya kebahagiaan di alam baka, kini jumlah orang yang berpandangan seperti itu mungkin sekali tinggal sedikit.¹⁶

¹⁵Edward Shils, "Kaum Cendekiawan," di dalam Dick Hartoko (ed.), *op.cit.*, hal.1.

¹⁶Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), hal. 275.

Dari perubahan dan perkembangan dalam masyarakat tersebut, ada kesan bahwa pengaruh evolusi dari atas ataupun pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan asing relatif besar. Hal itu dikesankan dari beberapa indikator, yaitu antara lain bahwa dengan makin dilaksanakannya Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan dilaksanakannya rencana pembangunan nasional, maka peranan kaum bangsawan atau priyayi yang sebelumnya masih terasa ada, lambat-laun semakin hilang. Hasil penelitian di beberapa desa Propinsi Sumatera Barat dalam tahun 1976–1977, juga menunjukkan bahwa perubahan dan perkembangan dalam segi-segi kehidupan masyarakat yang bersifat keduniawian relatif besar (lihat Tabel 1). Dalam tabel tersebut terlihat bahwa wali nagari yang kekuasaannya ditunjang oleh peraturan negara merupakan pemuka pendapat yang utama. Akan tetapi, dalam tabel itu tidak terlihat seberapa besar peranan kaum ulama dan pemuka adat. Bahkan, pendapat para pedagang atau petani lebih dituruti daripada guru sekolah agama.

Tabel 1

ORANG YANG PALING DITURUTI PENDAPATNYA

Pekerjaan	Dituruti Pendapatnya (%)
1. Wali Nagari	60,1
2. Pedagang	11,4
3. Petani	10,5
4. Guru Sekolah Agama	5,9
5. Buruh/tukang	4,2
6. Guru Sekolah Umum	3,3
7. Pensiunan	2,6
8. Pegawai Negeri	1,6

Sumber: Deppen, *Himpunan Ringkasan Hasil Penelitian Penerangan 1978–1980*, hal. 145.

Namun demikian, walaupun wali nagari merupakan pemuka pendapat utama, tetapi dia bukanlah satu-satunya pemuka pendapat. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa pola kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau mengalami perubahan, yaitu dari polimorfik ke arah monomorfik, atau dari multifungsional ke arah monofungsional. Lagi pula, masyarakat tidak selalu memberi penghargaan yang besar terhadap perubahan dan perkembangan akibat evolusi dari atas atau perencanaan pembangunan nasional. Ini terlihat dari berbagai indikator, yaitu antara lain adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lahirnya disponsori oleh pemerintah, seperti HKTI, HNSI, SPSI, KNPI, dan KUD, belum sepenuhnya dijadikan pusat kegiatan atau penyaluran aspirasi kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi anggotanya. Dalam Tabel 1, juga terlihat bahwa pegawai negeri yang merupakan bagian dari birokrasi yang kekuasaannya sangat besar, ternyata paling sedikit dituruti pendapatnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh CSIS di Yogyakarta dalam awal tahun 1985, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial yang diharapkan memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional, yang utama adalah para akademisi, negarawan dan politikus, serta pengusaha dan wiraswasta (lihat Tabel 2).¹⁷ Dari penelitian itu, juga terungkap bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan sejak tahun 1969 menghadapi berbagai masalah. Di antaranya, adalah usaha peningkatan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, efisiensi pemerintah, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan teknologi, merupakan bidang-bidang yang paling kecil kemajuannya. Dengan demikian, besarnya harapan para responden terhadap para akademisi tersebut, mungkin didasarkan pada pemikiran bahwa masalah dan tantangan pembangunan nasional lebih menuntut penyelesaian secara rasional dan profesional. Jika dugaan itu benar, maka hal itu semakin memperkuat hasil penelitian di Sumatera Barat bahwa perkembangan pola kepemimpinan dari polimorfik ke arah monomorfik cenderung semakin luas, tidak hanya berlangsung di dalam masyarakat perkotaan, melainkan juga di dalam masyarakat pedesaan.

Tabel 2

KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL YANG DIHARAPKAN
MEMAINKAN PERAN PENTING DALAM PEMBANGUNAN

Kelompok Sosial	Frekuensi(%)
1. Kaum Akademisi	42,4
2. Negarawan dan Politikus	19,2
3. Pengusaha dan Wiraswasta	11,9
4. Pekerja	6,6
5. Militer	4,6
6. Pegawai Negeri	4,6
7. Petani	4,6
8. Pemuka Agama	2,7
9. Pelajar	2,0
10. Serikat Pekerja	0,0

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih maju. Perubahan dan perkembangan dari dalam masyarakat sendiri terjadi terutama akibat pengaruh langsung dan tidak langsung dari unsur-unsur kebudayaan asing, khususnya kebudayaan yang berkembang di Barat yang kini telah menja-

¹⁷ Hasil penelitian belum dipublikasi.

di milik dunia, sehingga arah perkembangan masyarakat Indonesia pun mirip dengan perkembangan yang pernah dialami masyarakat negara-negara maju.

Apalagi setelah berlangsungnya pembangunan nasional dalam tahun 1969, unsur-unsur modernitas dari luar yang semakin banyak juga telah mempercepat perkembangan dalam masyarakat. Hal itu terlihat bahwa pelbagai bidang kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang relatif pesat. Dalam perkembangan itu juga terjadi diferensiasi dan spesialisasi yang semakin rumit. Dan, perkembangan yang semula berlangsung di kota-kota, kini telah melanda daerah-daerah pedesaan di seluruh pelosok tanah air. Perkembangan yang pesat itu pun telah ditanggapi oleh masyarakat luas secara positif, yaitu terlihat dengan semakin besarnya hasrat akan pendidikan. Bahkan, hasrat akan pendidikan guna meraih kemajuan tersebut telah berkembang dalam generasi muda dari masyarakat yang berpendidikan murni agama. Kecenderungan ini timbul, mungkin karena masalah-masalah pembangunan dan kehidupan dewasa ini lebih menuntut penyelesaian secara rasional dan profesional.

Perubahan nilai-nilai tersebut jelas akan mempengaruhi elemen-elemen sistem sosial lainnya, seperti kelembagaan, lapisan-lapisan sosial dan pola kepemimpinannya. Di antaranya adalah, berkembangnya diferensiasi dan spesialisasi akan semakin membatasi peranan para pemuka masyarakat hanya di dalam lingkungan bidang kehidupannya masing-masing. Dan, dengan semakin besarnya kebutuhan tenaga otak dan profesional, maka peranan para pemimpin tradisional dan agama pun akan semakin terbatas. Pergeseran peranan yang tidak menimbulkan keuntungan memang pahit, tetapi bagi para pemuka masyarakat yang kualitas kepemimpinan dan integritasnya tinggi, pergeseran peranan demi kemajuan masyarakat dan negara bangsa selayaknya ditanggapi secara dewasa.